

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu tindakan perubahan dalam menuju kemajuan untuk mendapatkan perubahan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Perubahan yang dimaksud yaitu perubahan dalam aspek politik, ekonomi, pendidikan, teknologi dan infrastruktur. Pembangunan ekonomi saling berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka pembangunan ekonomi akan berjalan dengan lancar. Tingginya angka kemiskinan merupakan salah satu masalah yang dapat menghambat pembangunan ekonomi dalam suatu negara. Ozughalu dalam (Yunia Arien. dkk, 2020) berpendapat bahwa dalam proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, kemiskinan merupakan tantangan bagi suatu negara.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dalam perekonomian, sehingga harus diberantas atau mungkin dikurangi. Terjadinya kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk faktor yang disebabkan oleh diri sendiri ataupun keturunan, serta faktor yang disebabkan dari luar, seperti pemerintah dan kondisi lingkungan. Menurut Maipita dalam (Arfa Valiant. dkk, 2022), adanya kemiskinan diakibatkan oleh perbedaan dalam kemampuan, kesempatan, dan penghasilan. Penduduk miskin akan mengalami kesenjangan sosial dan ketidakadilan untuk melakukan aktivitas dan memenuhi kebutuhan

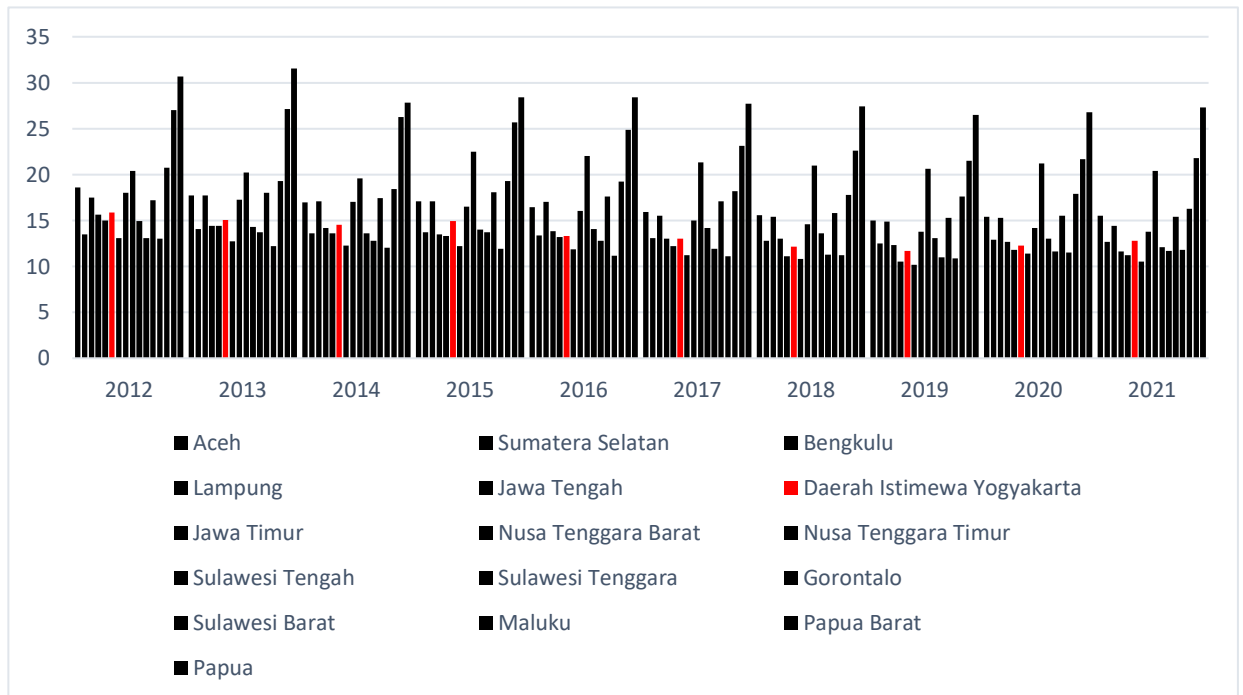
dasarnya, seperti tidak mendapatkan akses pendidikan, kesehatan yang berkualitas, dan standar kehidupan yang layak.

Menurut Badan Pusat Statistik (2020) untuk mengukur kemiskinan dapat menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*Basic Needs Approach*). Terdapat tiga indikator yang digunakan dalam pendekatan ini yaitu: *Head Count Index* (HCI) yang menunjukkan persentase penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*) adalah ukuran rata – rata perbedaan pengeluaran tiap penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*) merupakan nilai untuk menggambarkan distribusi pengeluaran diantara penduduk miskin.

Menurut Badan Pusat Statistik Nasional, pada tahun 2021 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki jumlah penduduk 3.970.220 jiwa dan luas daerah 3.185,80 km dengan jumlah penduduk miskin 506,45 ribu orang. Kepadatan penduduk dan luas daerah yang tergolong kecil menyebabkan berbagai permasalahan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, salah satunya yaitu masalah kemiskinan. Dalam proses perencanaan pembangun pemerintah, masalah kemiskinan ini termasuk masalah yang harus diatasi dengan serius, karena tinggi atau rendahnya tingkat kemiskinan tersebut akan sangat mempengaruhi kondisi perekonomian suatu daerah.

Gambar 1.1

Persentase Penduduk Miskin 16 Provinsi dan Daerah Tertinggi di
Indonesia Tahun 2012 – 2021

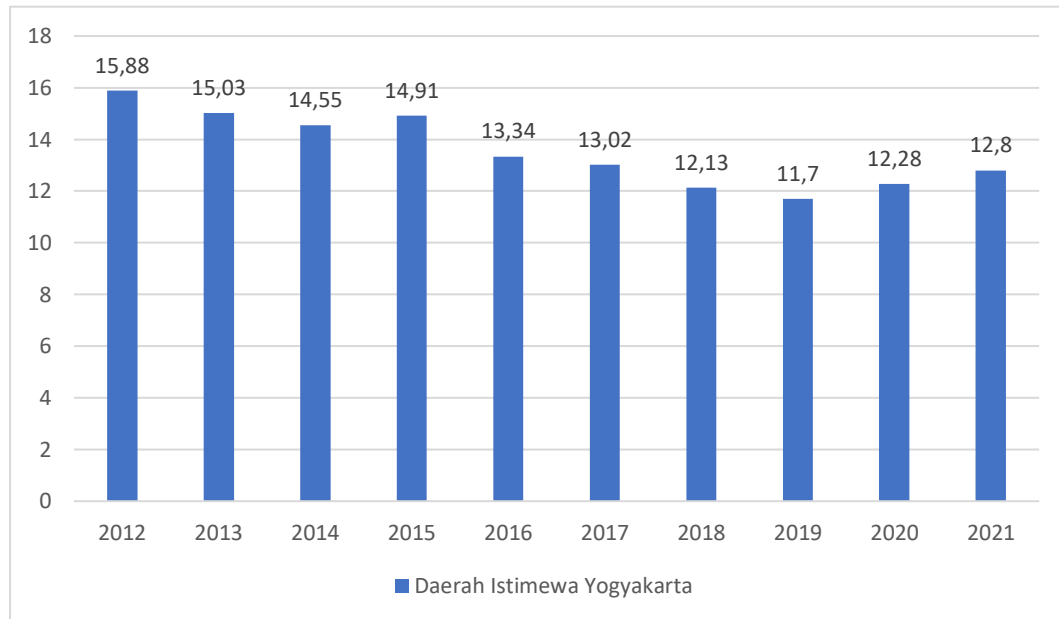


Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional (diolah)

Tingkat kemiskinan beberapa provinsi yang ada di Indonesia masih menunjukkan persentase yang lebih tinggi daripada persentase tingkat kemiskinan secara nasional. Hal tersebut tentu saja masih membutuhkan perhatian khusus dalam penanggulangan kemiskinan dengan kebijakan – kebijakan pemerintah pusat maupun daerah. Berdasarkan gambar 1.1 diketahui bahwa selama 10 tahun dari tahun 2012 hingga 2021 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berturut – turut masuk ke dalam 15 besar provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia. Data tersebut juga membuktikan bahwa tingkat kemiskinan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tergolong tinggi menduduki peringkat pertama dengan angka kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa.

Gambar 1.2**Tingkat Penduduk Miskin Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

Tahun 2012 – 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi D.I.Yogyakarta (diolah)

Dari data yang didapatkan melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa tingkat penduduk miskin Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kondisi yang naik turun atau biasa disebut kondisi fluktuatif. Pada tahun 2012 tingkat penduduk miskin Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sebesar 15,88%. Tahun 2013 dan 2014 terdapat penurunan sebesar 15,03% dan 14,55% serta terdapat peningkatan pada tahun 2015 menjadi sebesar 14,91%. Tahun selanjutnya mengalami penurunan berturut – turut yaitu 2016, 2017, 2018, dan 2019 menjadi sebesar 13,34%; 13,02%; 12,13%; dan 11,70%. Pada tahun 2020 dan 2021 tingkat penduduk miskin Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat peningkatan lagi sebesar 12,28% dan 12,80%.

Todaro dan Smith dalam (Yanto Kambaru dan Anastasia Diana, 2018) berpendapat bahwa adanya kemiskinan terdapat beberapa faktor yaitu tingkat penghasilan yang rendah, lapangan pekerjaan yang terbatas, laju pertumbuhan ekonomi yang lambat, ketimpangan pendapatan, fasilitas pelayanan kesehatan yang buruk dan pendidikan yang kurang. Selain itu, kemiskinan juga disebabkan oleh indeks pembangunan yang rendah dan meningkatnya jumlah pengangguran.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas masalah tersebut serta akan dilihat sejauh mana pengaruh faktor pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia dapat mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul **“Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Apakah ada pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
- b. Apakah ada pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

- c. Apakah ada pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis paparkan, maka tujuan pada penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Untuk mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4 Ruang Lingkup

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif yang menggunakan metode Analisis Regresi Linier Berganda. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat melalui Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada periode tahun 2012 – 2021.

Terdapat ruang lingkup masalah yang akan dibahas dalam memfokuskan penelitian ini yaitu:

- a. Pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- c. Pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh melalui hasil penelitian ini yaitu:

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan baru tentang pengaruh tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan indeks pembangunan manusia terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Sebagai referensi dan pertimbangan yang dapat dijadikan informasi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang serupa.
- c. Diharapkan penelitian ini akan menjadi acuan tambahan kepada pemerintah daerah dalam mengambil keputusan dan menentukan program – program dalam mengoptimalkan permasalahan kemiskinan, sehingga tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat berkurang dan dapat diberantas.